Implementasi Fungsi Administrasi Dakwah Pesantren Pasal 39 Undang-undang no.18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Darus-Sunnah Ciputat

Mohamad Yasir Arfan[1*], Rahmat Salam[2], Izzatusholekha[3]

[1]Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: mohamad.yasir@student.umj.ac.id
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: rahmat.salam@umj.ac.id
[3]Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: izzatusholekha@umj.ac.id

*****Correspondence
Received: September 1, 2024; Accepted: November 5, 2024; Published: December 30, 2024

Abstract— *This research discuss the implementation of the da'wah administration function carried out by the Darus-Sunnah Ciputat Islamic boarding school based on article 39 of Law No.18/2019, based on data from the Indonesian Ministry of Religion; The number of Islamic boarding schools throughout Indonesia has statistically reached around 39,220. However, the process of implementing the missionary function carried out by Islamic boarding schools is faced with obstacles and challenges ranging from good planning, direction to implementation. Referring to William H. Newman's theory through 7 (seven) general administrative function processes consisting of: planning, organizing, coordinating, reporting, budgeting, staffing, and directing. Want to measure how the implementation of the da'wah administration function is carried out. The type of research used is qualitative research with a descriptive method, namely trying to explain problem solving using available data through interviews, observation and documentation studies. Based on the analysis, the results obtained from the research and discussion show that the implementation of the da'wah administration function carried out by the Darus-Sunnah Islamic boarding school through seven administrative function processes has been running quite optimally, but with continuous efforts to improve the shortcomings of these administrative function processes.*

Keywords: *Implementation, Islamic Boarding School Da'wah, Administrative Function, UU.No.18/2019*

Abstrak—Penelitian ini membahas implementasi fungsi administrasi dakwah yang dijalankan pondok pesantren Darus-Sunnah Ciputat berdasarkan pasal 39 UU No.18/2019. Berdasarkan data Kemenag RI; Jumlah pesantren di seluruh Indonesia secara statistik sudah mencapai sekitar 39.220. Namun begitu, proses pelaksanaan fungsi dakwah yang dijalankan pesantren dihadapkan pada hambatan dan tantangan mulai dari perencanaan yang baik, pengarahan sampai kepada pelaksanaan. Mengacu kepada teori William H. Newman melalui 7 (tujuh) proses fungsi administrasi secara umum yang terdiri dari : planning, organizing, coordinating, reporting, budgeting, staffing, dan directing. Ingin mengukur bagaimana implementasi fungsi administrasi dakwah itu dijalankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu berusaha untuk memaparkan mengenai pemecahan masalah dengan menggunakan data-data yang tersedia melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan analisis, diperoleh hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi fungsi administrasi dakwah yang dijalankan pesantren Darus-Sunnah melalui tujuh proses fungsi administrasi sudah berjalan cukup maksimal, namun dengan terus berupaya memperbaiki kekurangan dari proses-proses fungsi administrasi tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Dakwah Pesantren, Fungsi Administrasi, UU.No.18/2019

DOI: https://doi.org/10.33511/misykat.v9n2.1-18 https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT
P-ISSN: 2527-8371 E-ISSN: 2685-0974
© 2024 The Author(s). Published by Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Open access under the CC BY-SA 4.0 licence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Melalui tradisi, metode dan kekhasannya sendiri pesantren dapat mampu bertahan sampai saat ini, Menunjukkan respon yang sangat positif, terbukti bermunculannya pesantren – pesantren di berbagai pelosok daerah di tanah air, diiringi dengan minat para orang tua untuk menitipkan anak-anaknya di pesantren. Pesantren masih menjadi rujukkan dan primadona terlebih di era modern saat ini, pesantren dianggap dapat menjadi benteng untuk membekali generasi muda disaat kemajuan teknologi semakin pesat.

Jumlah pesantren melalui data "Ditpontren" Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. EMIS tahun 2023 menyebutkan jumlah pesantren di seluruh Indonesia secara statistik sudah mencapai sekitar 39.220. Sedangkan jumlah santri aktif sebanyak 4.701.564 juta dan jumlah pengajar (kiai/ustad) sebanyak 370 ribu. [1]

Dari sekian banyak jumlah pesantren itu dalam perkembangannya, pesantren memliki model dengan karaktersitiknya yang berbeda-beda. Model – model pesantren yang saat ini berjalan, jika dilihat dari tingkat konsistensi dan keterpengaruhannya dengan sistem modern terbagi kepada tiga kategori yaitu : ***Pertama*** Pesantren Salaf, yaitu pesantren yang mempunyai ciri dengan mengkaji kitab – kitab klasik atau sering disebut dengan kitab kuning, kitab yang ditulis oleh para Ulama Abad 15 M. dengan sistem halaqah, *bandongan* dan *sorogan.*[2] ***Kedua*** Pesantren Khalaf (Modern), pesantren yang menggunakan pendekatan modern dengan sistem penjenjangan melalui satuan waktu seperti semester, dan menggunakan klasikal yaitu dibagi kepada kelas – kelas belajar. Materi pembelajaran biasanya masih menggunakan kitab – kitab yang digunakan pada pesantren salaf juga memadukan dengan kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku formal secara nasional baik itu ilmu – ilmu umum dan biasanya ditekankan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. ***Ketiga*** Pesantren campuran atau kombinasi adalah pesantren yang mempunyai kemiripan dengan pesantren salaf, yaitu selain memberikan pengajaran kitab – kitab klasik juga membuka lembaga Pendidikan formal agar para santri juga memahami ilmu – ilmu umum.[3]

Selain tiga kategorisasi pesantren tersebut, saat ini berkembang model pesantren berdasarkan karakteristik dan kekhasannya dengan mengkhususkan atau memfokuskan pada materi pembelajaran tertentu dengan 80% materi kekhususan dan yang 20% materi pembelajaran yang lainya. Sebut saja pesantren khusus Al-Qur'an, pesantren khusus Hadits, pesantren khusus dengan pengajaran tasawuf, pesantren khusus pendalaman bahasa Asing, Pesantren Agrobisnis, Pesantren Multikultural, Pesantren khusus Mahasiswa dan lain sebagainya.[4]

Jika dilihat berdasarkan kecenderungan praktik amaliah ibadahnya, model dan ciri khas masing – masing pesantren tidak terlepas dari pola pengajaran yang diberikan dan kemana arah afiliasi pesantren didirikan, dalam tataran praktis seperti pesantren yang berafiliasi kepada dua ormas terbesar di Indonesia yakni pesantren yang berafiliasi kepada ormas Muhammadiyah (yang berjumlah 402 pada tahun 2022) pesantren yang berafiliasi kepada ormas NU Nahdlatul Ulama (yang berjumlah 23.000 pesantren pada tahun 2023), mempunyai beberapa pandangan yang berbeda dalam praktek keagamaan, dan juga pesantren yang berafiliasi dengan ormas – ormas yang lainnya.[5]

Dari sekian jumlah yang ada, model dan karakteristiknya secara garis besar pesantren mempunyai tiga fungsi besar, ***Pertama;*** Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang terus melakukan informasi dan penyebaran ilmu-ilmu pengetahuan agama (*tafaqquh fi addin)* dengan nilai-nilai islam (*Islamic values).* ***Kedua***, Pesantren sebagai lembaga keagamaan juga melaksanakan kontrol

---

[1] Ditpdpontren.kemenag, *"Data Pesantren," EMIS PD-PONTREN,* 2023, https://ditpdpontren.kemenag.go.id/.

[2] Tobroni and Eka Firmansyah, *"Tipologi Manajemen Tradisional Dan Modern," Research and Development Journal Of Education* 8, no. 1 (2022): 333–38.

[3] Mohammad Zakki, *"Pesantren Pespektif Historis : Memahami Ragam a Historical Perspective of Boarding Schools : Understanding the Variety of Typologies and Developments in Indonesia,"* no. c (2023),

[4] Muhammad Makinuddin, *"Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren," MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019): 239–56.

[5] Fahd Ahmad, *"Mengenal Ciri Khas Pesantren Muhammadiyah,"* suaramuslim.net, 2019,

sosial (*social control).* ***Ketiga***, Pesantren sebagai lembaga keagamaan yang juga melaksanakan rekayasa sosial *(Social engineering)* atau perkembangan masyarakat (*community development*).[6]

Sejalan dengan itu lahirnya Undang – Undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, pesantren mempunyai tiga fungsi, pada BAB II "Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup" Pasal 4; Ruang lingkup fungsi pesantren meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan dari ketiga fungsi tersebut perlu adanya sistem yang mengatur untuk memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan ciri khasnya.
Khusus dalam fungsi dakwah pesantren pada Bab 3 bagian 5 "Pesantren dalam menjalankan fungsi dakwah" terdiri dari pasal 37 – 42.[7] Pesantren dalam menjalankan fungsi dakwah sebagaimana mengacu pada pasal 37 – 42 membahas tujuan, maksud, teknis pelaksanaan, dan dukungan dalam pelaksanaan fungsi dakwah. Sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga dakwah pondok pesantren mempunyai standar dalam menjalankan fungsi dakwahnya.

Pesantren selama ini lebih dikenal hanya sebagai lembaga pendidikan atau pengajaran dalam membekali pengetahuan tentang ajaran – ajaran keislaman, padahal lebih dari itu pesantren mempunyai tanggung jawab dan peran yang lebih luas sebagai pengembangan dari proses pendidikan yang dilakukan salah satunya yaitu sebagai fungsi dakwah. Walaupun secara otomatis dengan keberadaan pesantren beserta kegiatannya, pesantren sudah mencerminkan kegiatan dakwah melalui pengkaderan generasi bangsa melalui program pembelajan atau pendidikannya.[8]

Namun pada kenyataanya, banyak pesantren belum menjalankan fungsi dakwahya yang dikelola secara khusus dan bahkan belum terprogram dengan baik untuk kebermanfaatan yang lebih luas bagi umat atau masyarakat. Padahal potensi besar yang dimiliki pesantren sebagai lembaga yang memiliki sumber daya manusia sangatlah memungkin untuk juga menjalankan bahkan menjadi pendorong dakwah lebih luas. [9]

Sehingga pesantren perlu juga membuat suatu konsep dan program khusus tentang fungsi dakwah yang dijalankan pesantren. Sebagaimana pentingnya tujuan dakwah, maka penting juga memastikan bahwa dalam proses dakwah pesantren dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan fungsi dakwah itu sendiri, maka perlu adanya strategi dalam mengelola konsep dakwah yang ingin dicapai.

Maka dapat dikatakan fungsi dakwah pesantren saat ini dihadapkan pada persoalan, antara lain: belum maksimalnya fungsi dakwah yang dijalankan pesantren, proses dakwah di kalangan pesantren belum berjalan secara terstruktur dengan baik, termasuk di dalamnya mengorganisir, menghimpun sumber daya manusia serta mengelola konsep dan sasaran dakwah yang akan dicapai**.**

Sekaligus mejawab tantangan besar yang dihadapi pesantren dalam menjalankan fungsi dakwahnya saat ini yaitu berhadapan dengan tantangan modern dengan pesatnya kemajuan informasi dan teknologi, juga berhadapan dengan serangan budaya barat termasuk pemikiran liberalisme sekulerisme dan pluralism, sementara pada sisi lain budaya kerja di pesantren masih sering terasa kering dalam merespon kemajuan zaman. Sehingga diperlukan konsep dakwah yang dijalankan pesantren menjadi terorganisir dengan baik.[10]

Pada pasal 39 dalam prosesnya menjelaskan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dapat dilakukan oleh Kiai yang biasanya sebagai pimpinan pesantren, dapat juga dilakukan oleh santri sebagai peserta didik di pesantren, atau melalui lembaga khusus dakwah yang dibentuk oleh pesantren. Melalui konsep ini maka sangat perlu adanya pengaturan yang jelas di tataran pelaksanaan agar dakwah yang dijalankan mendapat hasil yang baik, terukur dan jelas dalam mencapai sasaran dakwah yang dituju.

---

[6] Ahmad Ihwanul Muttaqin, *STRATEGI ADAPTIF PONDOK PESANTREN DALAM MEMBANGUN LEARNING ORGANIZATION*, UIN KHAS JEMBER, 2022.

[7] JDIH BPK, *"Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren,"* JDIH BPK, 2019,

[8] Syahbuddin, *"Peran Pesantren Dalam Kaderisasi Dakwah," Al-Qolam "Jurnal Dakwah & Pemberdayaan Masyarakat"* 5, no. 2 (2021): 141–60.

[9] Irfan Mujahidin, *"PERAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAKWAH," SYIAR Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 31–44.

[10] Moh Ilham and Novie Andriani Zakariya, *"Analisis Kebijakan Kementerian Agama RI Terkait Impelementasi Program Kewirausahaan Di Pesantren Indonesia," Idarotuna* 4, no. 1 (2022): 27,

Maka salah satu bentuk keseriusan pesantren dalam menjalankan dan mengelola kegiatan dakwah sebagai fungsinya. Proses dakwahnya bisa berjalan dengan baik, terukur dan terarah dapat dilihat melalui teori fungsi administrasi William H. Newman dalam "The Work of Administration" 7 (tujuh) proses fungsi administrasi secara umum, yaitu terdiri dari : Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengkordinasian (Coordinating), Pelaporan (Reporting), Penyusunan Anggaran (Budgeting), Penempatan (Staffing), dan Pembimbingan (Directing).[11]

Peneliti ingin melihat bagaimana implementasi dari ketujuh proses fungsi administrasi tersebut diterapkan pada kegiatan dakwah pesantren, dari data dan pertimbangan di atas terdapat satu pesantren yang akan penulis kaji dengan data-data pendukung dan pembanding, sehingga dapat melihat proses dakwah yang dijalankan melalui sistem berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan dakwah pesantren atau tidak sesuai sistem administrasi, yaitu pondok pesantren Darus-Sunnah Ciputat Tangerang Selatan.

Pondok pesantren Darus-Sunnah berada di wilayah pemerintahan kota Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan SD Inpres No.11 Kelurahan Pisangan Barat, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pesantren Darus-Sunnah termasuk dari 90 pesantren yang terdapat di Tangerang Selatan.[12]

Pesantren Darus-Sunnah sebagai pesantren yang berusaha untuk fokus juga menjalankan fungsi dakwahnya. Pesantren Darus-Sunnah yang berdiri pada tahun 1997 dengan segmentasi para mahasiswa sebagai santrinya, dan lebih menspesialisasikan memperdalam kajian hadis dan ilmu hadis. Selanjutnya pada tahun 2014 pesantren ini berkembang dengan mendirikan lembaga pendidikan keagamaan enam tahun setingkat Tsanawiyah-Aliyah.

Saat ini, pesantren Darus-Sunnah bisa dimasukkan kepada model pesantren campuran atau kombinasi yaitu pesantren yang mempunyai kemiripan dengan pesantren salaf dengan memberikan pengajaran kitab – kitab klasik juga membuka lembaga Pendidikan formal agar para santri juga memahami ilmu – ilmu umum. Walaupun secara hitungan masa pesantren ini masih terbilang muda, namun peran pesantren sudah memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar pesantren khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan memberikan peran – peran kepesantrenan melalui amal usaha Darus-Sunnah, Lembaga dakwah dan pengabdian masyarakat.

Secara khusus melalui lembaga dakwah dan pengabadian masyarakat (LDPM) inilah pesantren Darus-Sunnah ingin berkontribusi lebih dalam menjalankan fungsi kepesantrenan yaitu fungsi penyiaran ajaran agama islam atau fungsi dakwah. Dakwah bagi pesantren Darus-Sunnah bukan hanya mencetak generasi proses pembelajaran di kelas, tetapi jauh lebih dari itu harus benar-benar dilaksanakan dengan praktek dakwah, baik dakwah dengan lisan atau pun dakwah dengan tulisan.

Maka fokus kajian yang akan diteliti melalui tujuh fungsi administrasi tersebut pada lembaga khusus dakwah yang dibentuk pesantren Darus-Sunnah yaitu Lembaga Dakwah dan Pengabdian Masyarakat (LDPM. Bagaimana konsep penerapan secara fungsi-fungsi administrasi, pelaksanaan dakwah dilakukan pesantren pesantren Darus-Sunnah, dengan tiga program besarnya LDPM pesantren Darus-Sunnah yaitu: 1). Program Pengkaderan khusus 2). Program "Biksah" (pengiriman da'i) dan kerjasama antar lembaga 3). Program dakwah online.[13]

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Darus-Sunnah yang beralamat di Jalan SD Inpres No.11 Kelurahan Pisangan Barat, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.sedangkan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada periode November – Desember 2023.

---

[11] Mohammad. et al Sawir, *IlMU ADMINISTRASI DI SEGALA BIDANG,* 2020.: 77

[12] Ditpdpontren.kemenag, *"Data Pesantren.* 2023"

[13] Pesantren Darus-Sunnah, *"MENJADI LEMBAGA YANG UNGGULDALAM PENGADERAN ULAMA,"* Pesantren Darus-Sunnah, 2022, https://darussunnah.sch.id/madrasah-darus-sunnah/.

Penelitian ini bermaksud untuk memahami dan mendeskripsikan secara cermat dan mendalam tentang implementasi fungsi administrasi yang diterapkan pada kegiatan dakwah pesantren Darus-Sunnah Ciputat melalui teori William H. Newman; tujuh proses fungsi administrasi secara umum yang terdiri dari : Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengkordinasian (Coordinating), Pelaporan (Reporting), Penyusunan Anggaran (Budgeting), Penempatan (Staffing), dan Pembimbingan (Directing). Penelitian kualitatif yang berhubungan dengan persepsi, pendapat atau kepercayaan para informan tentang pelaksanaan implementasi fungsi administrasi dalam menjalankan proses dakwah di Pondok Pesantren Darus-Sunnah Pisangan Ciputat.

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling tepat dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dikarenakan penelitian ini berjenis penelitian implementasi, dengan pendekatan penelitian kualitatif, maka metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.[14]

Observasi atau pengamatan juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dalam observasi langsung ini peneliti mendatangi langsung pondok pesantren Darus-Sunnah yang berada di daerah kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Tangerang selatan,. Sehingga observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan proses administrasi dakwah pesantren dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi fungsi administrasi dakwah pesantren Darus-Sunnah pisangan ciputat.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang paling utama, menurut Jhon W Craswell (2010:267) wawancara adalah agar peneliti dapat melakukan face to fece interview dengan partisipan, wawancara dengan telepon atau terlibat dalam interview kelompok tertentu. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dan secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan.[15] Wawancara yang dilakukan peneliti untuk menggali data terkait pelaksanaan proses implementasi fungsi administrasi dakwah pesantren Darus-Sunnah Pisangan ciputat adalah Pimpinan pesantren Darus-Sunnah, Ketua lembaga dakwah dan pengabdian Masyarakat pesantren Darus-Sunnah, Peserta program dakwah lembaga dakwah dan pengabdian Masyarakat pesantren Darus-Sunnah sekaligus alumni pesantren dan Kasi Ditpontren Kementerian Agama Tangerang Selatan.

Studi dokumentasi dalam penelitian adalah berupa data dokumen yang berkaitan dengan dengan masalah penelitian. Menurut Jhon W Craswell (2010:267-268), selama proses penlitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen, bisa juga berupa dokumen public seperti koran, makalah, laporan penelitian atau dokumen privat buku harian, video, atau segala jenis surat termasuk email. Disertai juga lampiran foto–foto kegiatan pada saat melakukan penelitian, pencarian dan pengumpulan data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, gambar, data- data, serta dokumen terkait dan sebagainya mengenai dakwah yang dijalankan pesantren Darus-Sunnah Pisangan Ciputat Tangerang selatan.

Dalam rangka penelitian yang akan melibatkan beberapa pihak, maka peneliti membutuhkan informan yang dapat memberikan keterangan dan data dari individu tertentu untuk keperluan dan informasi. Metode penentuan informan yang digunakan ini adalah Purposive Sampling. sumber informasi yang dipilih secara purposive sampling adalah "sebagai sampel sumber data yang akan ditetapkan secara sengaja untuk peneliti lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan – pertimbangan.

---

[14] Indriana Ayuningtias, Syahril, and Moh. Faisol, *"Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle," Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 2, no. 1 (2021): 21–35,

[15] Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).202

Sampling purposive dilakukan dengan mengambil individu yang dipilih secara tepat oleh peneliti sesuai dengan kualitas tertentu dari contoh tersebut. Misalnya, orang-orang yang berumur tertentu, mempunyai kedudukan tertentu, mempunyai tingkat pendidikan tertentu, dan pernah mengikuti kegiatan masyarakat tertentu. sehingga penggunaan pengujian purposif bermaksud untuk melakukan pengujian secara subyektif dengan anggapan bahwa contoh atau sampel yang diambil adalah gambaran keterwakilan dari peneliti, sehingga pengumpulan informasi secara langsung pada sumbernya dapat diselesaikan secara akurat untuk ketepatan penelitian.

Adapun informan atau narasumber yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan pondok pesantren Darus-Sunnah, dari informan ini peneliti menggali informasi mengenai gambaran umum pesantren Darus-Sunnah dan gambaran umum terkait program dakwah seabagai salah satu fungsi pesantren, serta informasi tentang informan penelitian
2. Ketua lembaga dakwah dan pengabdian Masyarakat pesantren Darus-Sunnah, dari informan ini peneliti menggali informasi mengenai gambaran pelaksanaan program lembaga dakwah dan pengabdian masyarakat pondok pesantren Darus-Sunnah.
3. Peserta program dakwah lembaga dakwah dan pengabdian Masyarakat pesantren Darus-Sunnah sekaligus alumni pesantren, dari informan ini peneliti menggali informasi dari sisi peserta mengenai gambaran pelaksanaan dakwah dari mulai persiapan sampai pada kondisi dilapangan.
4. Kasi Ditpontren Kementerian Agama Tangerang Selatan, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan dakwah yang dijalankan pesantren, termasuk di dalamnya dukungan dan pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama.

Selanjutnya untuk teknik analisis dan keabsahan data melalui uraian deskriptif yang diperoleh dari seluruh data observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Data-data ini akan dikaji dan dianalisis secara kualitatif. Secara umum teknis analisis data yang dilakukan dalam mengkaji implementasi fungsi administrasi dakwah pesantren pasal 39 UU No.18/2019 adalah melalui : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan Data dalam proses ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari, mencatat dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi dan observasi data yang terkait dengan fungsi administrasi dan implementasi fungsi dakwah pesantren.

Reduksi Data yang didapatkan dari pengumpulan data di lapangan sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu fungsi administrasi melalui teori fungsi administrasi William H. Newman di pesatren Darus-Sunnah Ciputat, dalam mereduksi data peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, meggolongkan data untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan.

Penyajian data adalah sekumpulan infromasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan – kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Data yang disajikan dalam mengkaji fungsi administrasi dakwah di pesatren Darus-Sunnah Ciputat berupa teks naratif.

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini berupaya mencari makna dari data terkait tentang implementasi proses fungsi administrasi dakwah pesantren pasal 39 UU No.18/2019 di pondok pesantren Darus-Sunnah Ciputat dan kemudian membuat kesimpulan, dengan proses melalui mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proeses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk menguji keabsahan data dalam mengkaji implementasi fungsi administrasi dakwah di pesantren Darus-Sunnah Ciputat, digunakan dua cara :

1. Triangulasi Sumber, yaitu untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi sumber melalui kroscek informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

2. Triangulasi Teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini melakukan dengan pengambilan data melalui data yang bebeda yaitu wawancara dengan informan dan analisis dokumen.

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, berdasarkan kepada landasan teoris dan normative, maka dirumuskan kerangka berpikir yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Bagaimana implementasi fungsi administrasi dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk dakwah pesantren sesuai dengan UU No.18/2019 khususnya pada pasal 39.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

C. Temuan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tentang Implementasi Fungsi Administrasi Dakwah Pesantren di Pondok Pesantren Darus-Sunnah Ciputat

Kaitan Implementasi Administrasi Dengan Kegiatan Dakwah

Pengertian dakwah dalam KBBI (1990:181) adalah penyiaran, propaganda. Atau menyebarkan agama ke seluruh masyarakat dan mendorong pengembangannya, mendorong masyarakat untuk menerima, mempelajari, dan mengikuti ajaran agama. Dakwah adalah mengajak, menyeru (memanggil) masyarakat untuk mempelajari dan menerapkan ajaran agama atau mempelajari ajaran agama.

Sedangkan dalam kamus (Munawir, 1997:406-407) Dari segi bahasa "Dakwah" artinya: panggilan, seruan atau ajakan. Bentuk kata-kata ini dalam bahasa Arab disebut "Masdhar". Sedangkan bentuk kata kerjanya (fi'il) artinya : menyeru, menyeru atau mengajak (Da'a, Yad'u, Da'watan). Orang yang berdakwah biasa disebut Da'i dan orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwah disebut mad'u.

Sedangkan Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya *"Hidayatul Mursyidin"* memberikan definisi dakwah ialah: mengajak sekaligus mendorong manusia agar berbuat kebaikan serta menngikuti petunjuk (anugerah), menyeru mereka berbuat kebaikan dan menghindari dari kemungkaran, guna mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat. [16].

Dakwah sebagai seruan yang memiliki kandungan ajakan kepada sesama untuk mengenal, menghayati dan menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari guna menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam pelaksnaannya tidak hanya sebatas penggambaran dan penyampaian saja, namun juga mempunyai bagian pengarahan serta pembinaan kepada umat atau masyarakat.

Fungsi dakwah pesantren yang didukung oleh proses pengajaran atau pendidikan dengan pengkaderan dan sumber daya, tentu menjadi modal yang dimiliki pesantren untuk menjalankan fungsi dakwahnya sesuai prinsip dan tujuan dakwah yang baik. Karenanya dibutuhkan konsep perencanaan dalam menjalankan dakwah yang ingin dijalankan oleh pesantren agar tujuan dan target dakwah dapat tercapai.

[16] Mohammad Arif, *"Implementasi Dakwah Rasulullah Dalam Era Milenium," Jurnal Asketik* 4, no. 1 (2020): 110.

Mengacu kepada UU No.18 Tahun 2019 khusus pasal 39 : *"Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren yaitu daapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren"*, dalam hal ini pesantren Darus-Sunnah sudah mencoba menjalankan fungsi dakwahnya dengan menerapkan pasal 39 melalui Kiai, santri dan juga pembentukkan lembaga dakwah yang disebut Lembaga Dakwah dan Pengabdian Masyarakat "LDPM" pesantren Darus-Sunnah.

Adapun implementasi administrasi dapat dibedakan antara implementasi itu sendiri dengan teori administrasi. Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, "bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya". Sejalan dengan itu Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, "implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Istilah implementasi biasanya juga berkaitan dengan pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan. Seperti yang disampaikan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi sebagai proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditentukan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran.[17]

Sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn dikutip Parsons (1995: 461) juga Wibawa, dkk., (1994: 15) menjelaskan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.[18]

Adapun pengertian "administrasi" secara etimologi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu "ad" dan "ministrate" yang berarti "to serve" yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.

Serangkaian kegiatan yang dikerjakan sekelompok orang dalam suatu Kerjasama untuk mencapai tujuan terntu disebut administrasi. Mengutip dalam bukunya Siagian; bahwa administrasi adalah "keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.[19]

Adapun dalam paparan William H. Newman, menyebutkan dalam "The Work of Administration" dapat dibagi pada 7 (tujuh) proses fungsi administrasi secara umum, yaitu terdiri dari : planning, organizing, coordinating, reporting, budgeting, staffing, dan directing.[20]

Lembaga Dakwah dan Pengabdian Masyarakat "LDPM" Pesantren Darus-Sunnah

Lembaga Dakwah dan Pengabdian Masyarakat "LDPM" pesantren Darus-Sunnah ini pada awalnya dibentuk adalah untuk melanjutkan program pengiriman santri-santri yang sudah pada tingkat akhir kelas Mahasantri. Disebut melanjutkan karena program ini sejatinya sudah berjalan cukup lama sebelum LDPM dibentuk, melalui pengiriman santri-santri ke beberapa masjid-masjid, mushala, majelis ta'lim sekitar pesantren, dan kemudian berlanjut pengiriman santri untuk berdakwah ke beberapa wilayah di Indonesia.

Dipelopori oleh pendiri pondok pesantren Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. program pengiriman santri ini disebut dengan *"biksah" (Biksah;* penyebutan dalam bahasa Arab,

[17] Haedar Akib, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.

[18] Ahmad Royani, "Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Arus Perubahan," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 2018,

[19] Sondang P. Siagian, *"Kerangka Dasar Ilmu Administrasi Administrasi"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 285.

[20] Sawir, *ILMU ADMINISTRASI DI SEGALA BIDANG.* (2020): 77

yang diartikan "utusan" atau mengutus*)*. Sampai pada saat pendiri pesantren wafat pada Tahun 2016 lembaga dakwah dan pengabdian masyarakat baru dibentuk pada tahun 2019.[21]

Lembaga Dakwah dan Pengabdian Masyarakat "LDPM" pesantren Darus-Sunnah berada dibawah struktur pengurusan pesantren Darus-Sunnah di ketuai 1 orang dan dibantu 1 oang wakil, kemudian dibawahnya dibentuk sebagai pelaksana kegiatan dilibatkan para Mahasantri dengan tugas membantu divisi dakwah online majalahnabawi.com dan chanel youtube darus-sunnah.

Dakwah yang dijalankan pesantren Darus-Sunnah melalui Program LDPM disusun dengan beberapa program dakwahnya, selain program *'biksah'* LDPM juga meyusun program dakwah online dengan membuat majalah online melalui kanal website "*majalahnabawi.com"* yang berisi konten-konten kajian keislaman seperti artikel kajian al-Quran, hadis, fikih, tokoh, opini, Riwayat, kajian khusus perempuan, khubah jumat dan adab. Selain itu dakwah online mempunyai kanal "youtube pesantren darus-sunnah" yang berisi konten-konten kajian keislaman, kegiatan dakwah pesantren darus-sunnah.

Proses dakwah yang dijalankan pesantren Darus-Sunnah dapat dilihat sebagai pesantren yang mencoba menjalankan amanah fungsi pondok pesantren. Proses-proses inilah yang akan diukur melalui fungsi-fungsi administrasi sebagai sebuah lembaga yang juga membentuk lembaga khusus LDPM, yang nantinya bisa jadi proses dakwah yang dijalankan pesantren Darus-Sunnah dapat menjadi percontohan bagi pesantren yang lainnya.

LDPM Darus-Sunnah merancang program-program diantaranya :

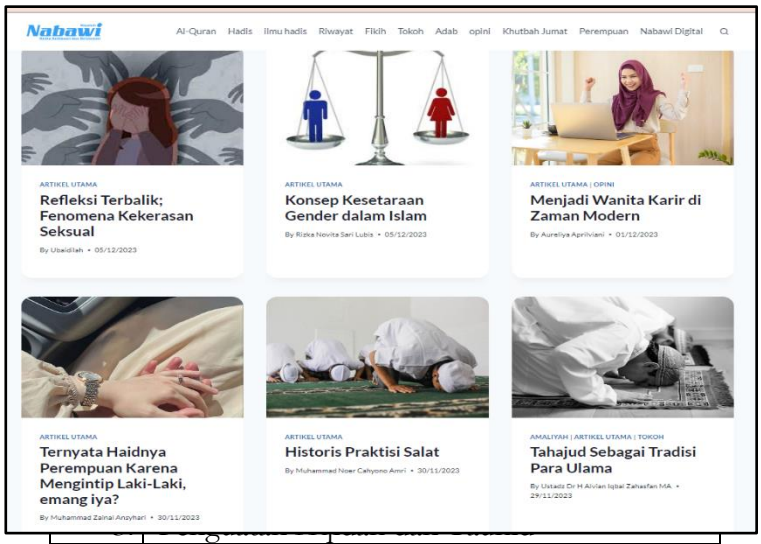
1) Program Pengkaderan khusus; dilakukan khusus untuk para santri tingkat akhir atau Mahasantri untuk mempersiapkan kader dakwah yang siap diterjunkan ke umat/masyarakat (pendalaman materi dakwah, retorika dan psikologi dakwah)
2) Program "Biksah" dan kerjasama antar lembaga; melakukan pengiriman kader dakwah sebagai program internal atau atas permintaan lembaga - lembaga luar.
   Secara rincian kegiatan yang pernah dilakukan antara lain :
   - Bekerjasama dengan Masjid, mushala, majelis ta'lim, sekolah: sebagai narasumber khatib jumat, ceramah agama PHBI, bimbingan pengajian anak-anak, dan pengajian umum.
   - Kegiatan Kerjasama rutin, sejak tahun 2010 sampai saat ini melalui Pemerintah Papua dan IAIN Papua, pengirimin 3 – 5 kader da'i dengan jangka waktu selama 1 – 2 tahun di wilayah Papua, Papua barat dan Kaemana.
   - Program khusus Ramadhan, kegiatan pengiriman da'i yang dilakukan khusus selama bulan Ramadhan, baik di wilayah sekitar pesantren/ wilayah ciputat dan sekitarnya maupun di luar kota dan luar negeri, seperti Papua, Pakpak, Raja ampat, Labuan bajo, Malaysia, Singapura dan Amerika Serikat.
   - Kegiatan khusus Poso, yaitu dilakukan sejak 2019 bekerjasama dengan Kepolisian Indonesia "Polri" dan lembaga pemerintah Poso sebagai program deradikalisasi. Program beasiswa kuliah anak-anak Poso di Jakarta dan Pesantren Darus-Sunnah sebagai tempat tinggal peserta sekaligus pengkaderan dan pendalam keilmuan Islam. Sudah berjalan 3 periode pengiriman dengan total 15 orang dengan masa belajar 3 tahun dan kemudian di kembalikan atau di pulangkan ke kampung halamannya sebagai agen dakwah di Poso.
   - Pembuatan pesantren di wilayah Poso, bekerjsama dengan pemerintah pusat melalui pemerintah Poso sebagai kelanjutan Beasiswa anak-anak Poso. Alumni yang sudah menyelesaikan belajar di Jakarta akan di tugaskan mengurus pesantren dan sebagai pengajar dengan kurikulum yang dibuatkan Darus-Sunnah.
3) Program dakwah online : yaitu dakwah yang dilakukan melalui media online, melalui kanal website "*majalahnabawi.com"* yang berisi konten-konten kajian keislaman seperti artikel kajian al-Quran, hadis, fikih, tokoh, opini, Riwayat, kajian khusus perempuan, khubah jumat dan adab.

[21] Laodza Aisara Alqan, *"Biksah: Warisan Dakwah Kedamaian KH. Ali Mustafa Yaqub Di Indonesia Timur*," Bincangsyariah.com, 2023,

Selain itu dakwah online mempunyai kanal "youtube pesantren darus-sunnah" yang berisi konten-konten kajian keislaman, kegiatan dakwah pesantren darus-sunnah.

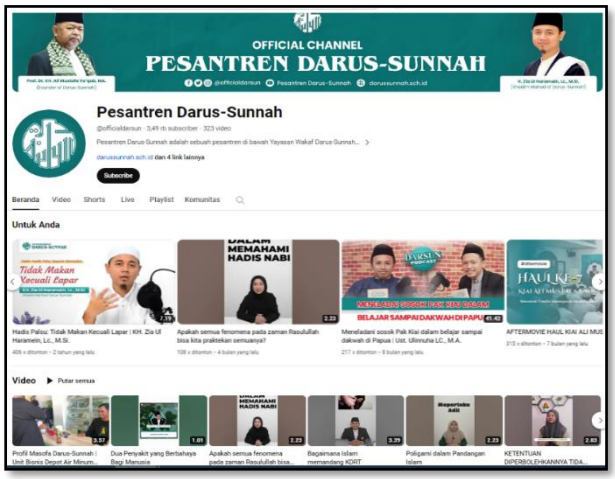
Dalam membuat tema-tema materi dakwah, dari masing-masing program selain akan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta dakwah dan atau permintaan lembaga yang bekerjasama. Setiap program sudah membuat tema-tema besar.

Tabel 1. Tema-tema pokok materi dakwah



4.	Pemahaman seputar fiqih (ibadah)
5.	Kajian sejarah keislaman
6.	Kajian keislaman dan Kemasyrakatan

Gambar 2. Dakwah Online "majalahnabawi.com



Gambar 3. Dakwah online kanal youtube



Gambar 4. Rapat kerja pengurus

Untuk memudahkan dalam merumuskan hasil penelitian dari masing-masing informan, dapat disimpulkan berdasarkan kemiripan dan keseragaman jawaban. Antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil wawancara dengan informan implementasi fungsi administrasi dakwah pesantren Darus-Sunnah

Fungsi Administrasi	Indikator	Hasil wawancara
Fungsi administrasi dakwah yang diajalankan Pesantren Darus-Sunnah. Djalankan melalui : Pimpinan pesantren/Kiai, Santri & Lembaga dakwah pesantren Sesuai dengan pasal 39 UU.18/2019 Informan : 1. Pimpinan Pon-Pes Darus-Sunnah 2. Ketua lembaga dakwah dan pengabdian Masyarakat "LDPM" pesantren Darus-Sunnah: 3. Peserta program dakwah dan alumni	Perencanaan (Planning)	- Penyusunan program-program kerja dari masing-masing divisi *termasuk* ***lembaga dakwah dan pengabdian Masyarakat "LPDM"*** (raker tahunan, rapat bulanan) - Program *Biksah* (mengutus santri), dakwah online (website Nabawi, chanel youtube) - Pematangan kaderisasi santri/SDM yang siap diterjunkan - Koordinasi lembaga jaringan di berbagai lembaga dan daerah (menerima permintaan *program biksah, MOU, atau kerjsama program)*
	Pengorganisasian (Organizing)	- Kepengurusan pesantren dibentuk melalui divisi/seksi : kepala ma'had/Pimpinan pesantren, dibawahnya dibentuk beberapa divisi, bagian umum, bendahara, tata usaha, bag.mahasantri, bag.madarasah, dan bagian lembaga di bawah kepengurusan pesantren, seperti amal usaha darus-sunnah,

Pesantren Darus-Sunnah		lembaga dakwah dan pengabdian masyarakat - Dari masing-masing seksi dikepalai 1 orang dan biasanya diantu staff yang membantu - pengurus pesantren saat ini sebagian besar (sekitr 80%) berasal dari para alumni
	Pengkordinasian (Coordinating)	- **koordinasi internal**; diadakan rutin rapat mingguan, bulanan dan tahunan - **koordinasi eksternal**: kepada pihak luar (bergabung di FSPP Tang-Sel, lembaga jaringan sperti kampus,ormas dll, lembaga pemerintah) - **khusus lembaga dakwah "LDPM"**: tahapan koordinasi dilakukan dengan 3 tahap: 1). Koordinasi antar pengurus, penyeleksian sdm, 2). Koordinasi dgn SDM saat pelaksanaan dakwah, 3). Koordinasi dgn pelaksna/lembaga jaringan
	Pelaporan (Reporting)	- secara Umum; setiap divisi tentu saja masing-masing membuat laporan, apa saja yng sdh dikerjakan dan yang belum, kendalanya apa dsb - khusus lembaga dakwah "LDPM": pelaporan itu melalui koordinasi, melalui pelaksana dakwah/dai, melalui lembaga/masyarakat dengan melihat respon kepuasan. 1).Laporan dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan, 2).laporan secara keseluruhan setelah program benar-benar selesai. 3).laporan kegiatan dakwah disampaikan juga melalui cerita perjalanan dakwah di website/majalahnabawi.com
	Penyusunan Anggaran (Budgeting)	- Penyusunan anggaran disesuaikan dengan divisi masing-masing pada saat raker tahunan yang disesuaikan dengan keuangan yayasan pesantren - Khusus lembaga dakwah "LDPM", biasanya juga dikerjasamakan dengan jaringan lembaga yang menggunakan SDM seperti tempat tinggal, akomodasi dan sebagainya)

	Penempatan (Staffing)	- Kepengurusan pesantren pada masing-masing seksi dikepalai 1 orang dan dibantu 1 orang staff. - Khusus lembaga dakwah "LDPM", dilibatkan juga santri menjadi koordinator pada bbrp program sepeti pengelolaan website majalahabawi.com - Penempatan peserta dakwah disesuaikan juga dengan permintaan jaringan lembaga
	Pembimbingan (Directing)	- Pembimbingan pengurus biasanya diadakan rutin, melalui rapat koordinasi pengurus - Untuk mendukung kepengurusan dan kegiatan pesantren diadakan pelatihan kepemimpinan leadersip, pelatiahn pengelolaan keuangan, pelatihan ICT/internet, website dan jaringan online - Terkait lembaga dakwah, bimbingan yang dilakukan adalah pelatihan dan pengembangan SDM, pendalaman materi dakwah, kepemimpinan, psikologi dakwah, medan dakwah

Selain itu dalam menjalankan fungsi dakwah pesantren sangat diperlukan dukungan selain dari lembaga keumatan tentu saja pemerintah yang dalam hal ini kementarian Agama. Maka perlu juga mengetahui sejauh mana Kasi Ditpontren Kementerian Agama Tangerang Selatan dalam memberikan dukungan dan pengawasan terhadap fungsi dakwah yang dijalankan pesantren yang diukur melalui beberapa indicator

Tabel 3. Hasil wawancara implementasi dukungan dakwah pesantren

Fungsi Implementasi	Indikator	Hasil wawancara
Terkait : Implementasi Dukungan dakwah pesantren Pasal 42 : "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan". Informan:	**Komunikasi**	**PROSES PENYAMPAIAN INFORMASI** - Informasi kebijakan dikoordinasikan dari pusat ke wilayah sampai kepada baru kemudian disampaikan ke public - Informasi yang disampaikan saat ini sudah lebih banyak menggunkan sistem internet/digital (website/aplikasi). Untuk pendataan menggunakan sistem EMIS, Untuk bantuan menggunakan aplikasi simba - Informasi juga disampaikan melalui jaringan antar pesantren yang dibentuk FSPP "Forum Silaturahim Pondok Pesantren" **KEJELASAN**

Kasi Ditpontren Kementerian Agama Tangerang Selatan		- Setiap informasi yang diberikan ke pesantren lumayan menadapat respon yang baik, ada bberapa pesantren yang memang tidak terlalu aktif menanggapi informasi-informasi - Respon yang cepat ditanggapi biasanya terkait pendanaan, sarana dan prasarana **KONSISTENSI INFORMASI** - *Informasi-informasi yang rutin disampaikan ke pesantren terkait informasi pembinaan, himbauan, pendataan lembaga, informasi bantuan dari pusat yang diteruskan kemenag tangsel juga ada* - *informasi rutin ditampilkan melalui web kemenag baik yang pusat maupun di Tangsel. (berkala biasanya ada yang 6 bulan/1 tahun)*
Tanggapan dari masyarakat 1. Pim Pon-Pes Darus-Sunnah *(sebagai objek kebijakan)* *2. Peserta program dakwah*	Apakah pegawai PAKIS (Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam) Kemenag Tangerang Selatan" selalu memberikan informasi terkait dukungan dakwah pesantren ?	- Adanya informasi-informasi yang diberikan ke pesantren, seperti info pembinaan, layanan, himbauan, pendataan lembaga, info bantuan - info biasanya disampaikan melalui FSPP, dan Website kemenag Tang-Sel
Kasi Ditpontren Kementerian Agama Tangerang Selatan	**Sumber Daya**	- Dari segi kuantitas secara struktur tidak banyak namun cukup bisa ditangani. Dibawah PAKIS ini ada 4 bidang, 1. Bid PNS (kepegawaian), 2.Pontren dan Madrasah Diniyah Taklimiyah, 3.LPQ, 4,GPAI Non PNS.- - Dari segi kualitas masih bisa dipertanggungjawabkan sesuai tanggungjawab tugas masing-masing **FASILITAS DUKUNGAN YANG DIBERIKAN TERKAIT DAKWAH PESANTREN** - dukungan perizinan, pembinaan, pendanaan walaupun terbatas - fasilitas informasi kita manfaatkan yang ada, melalui website kemenag, perangkat digital, forum-forum silaturahmi, dan sebagainya

Tanggapan dari masyarakat 1. Pim Pon-Pes Darus-Sunnah *(sebagai objek kebijakan)* *2. Peserta program dakwah*	Apakah ketersediaan sumberdaya PAKIS (Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam) Kemenag Tangerang Selatan" sudah dapat membantu berjalannya dakwah pesantren?	- Sampai saat ini tidak ada kesulitan selama pesantren membutuhkan informasi, perizinan, surat keterangan - Untuk dukungan fasilitas yang berupa pendanaan saya rasa belum ada karena selama ini biasanya dukungan pendanaan pada bidang Pendidikan pesantren
Kasi Ditpontren Kementerian Agama Tangerang Selatan	**Disposisi**	- Dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, - - sistemnya sudah terbentuk dengan struktur kerja masing-masing unit, dan dikerjakan sesuai dengan agenda-agenda kerja sesuai porsinya masing – masing. - Respon dari masyarakat pesantren, - menerima pengaduan dan masukan
Tanggapan dari masyarakat 1. Pim Pon-Pes Darus-Sunnah *2. peserta program dakwah*	*Apakah pihak pesantren melihat ada keseriusan dan komitmen terhadap kinerja yang diberikan pejabat/pegawai kasi PAKIS dalam menajalankan tugasnya?*	- *Kalau dari pelayanan cukup baik, pihak kemenag juga biasa memberikan informasi-informasi dan sebagainya. Untuk dukungan dakwah beberapa perwakilan kemenag juga ikut hadir pada acara-acara yang kami adakan.* - *Khusus untuk program dakwah hanya melalui support/dukungan moril bahwa pesantren harus menajalankan tugasnya untuk berdakwah, kemenag juga sudah sering memberikan himbauan terkait isi/subtansi atau materi dakwah yang sejuk*
Kasi Ditpontren Kementerian Agama Tangerang Selatan	**Struktur Organisasi**	- *Struktur Kemenag Tangsel terdiri dari; kepala kantor "Kemenag Tangerang Selatan", dibawahnya ada Kasubag Tata Usaha, kemudian dibawahnya kepala kantor dan kasubag tata usaha terapat 6 kasi yang setara yaitu Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Pendidikan Agama dan Kependidikan Islam (PAKIS), Kasi Penyelenggaran Haji dan Umroh (PHU), Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS Islam), Kasi Penyelenggara Kristen, Kasi Penyelenggara Katolik"* - Pondok pesantren masuk di wilayah kerja PAKIS, dibawah strukur PAKIS ada 4 bidang, 1. Bid PNS (kepegawaian), 2.Pontren dan

		Madrasah Diniyah Taklimiyah, 3.LPQ, 4,GPAI Non PNS - Tanggung jawab kerja disesuaikan dengan divisi masing-masing dengan komitmen bekerja sama sesuai dengan prosedur peraturan kerja yang sudah ditetapkan melalui SK dan peraturan yang berlaku
Tanggapan dari masyarakat 1. Pim Pon-Pes Darus-Sunnah *(sebagai objek kebijakan)* *2. peserta program dakwah*	*Bagaiman pelayanan Kemenag TangSel khususnya kasi PAKIS dalam menajalankan tugasnya?*	- Untuk layanan biasanya diarahkan langsung ke bagian yang berhubungan dengan keperluan kepesantrenan yatu ke bagian PAKIS yang membawahi kegiatan kepesantrenan. *termasuk mengenai dakwah pesantren, tentang perizinan dan sebagainya. Secara struktur di kemenag Tangsel sih buat kami cukup memudahkan.* - *terkait pesantren dan dakwah pesantren karena berada di bawah kasi Pakis biasanya langsung mengarahkan kesana, selama ini tidak ada kesulitan, namun untuk program khusus dakwah pesantren perlu ada peningkatan pengawasan lagi terkait subtansi isi/materi dakwah pesantren yang pegurus kemenag harus terjun langsung juga ke lapangan*

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan serta didukung temuan-temuan peneliti di lapangang tentang implementasi fungsi administrasi pada kegiatan dakwah pesantren pasal 39 Undang - Undang No.18 Tahun 2019 studi kasus di Pondok Pesantren Darus-Sunnah Ciputat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses dakwah yang dijalankan pesantren Darus-Sunnah secara keseluruhan sudah dijalankan sesuai dengan 7 indikator fungsi administrasi yaitu mulai planning, organizing, coordinating, reporting, budgeting, staffing, dan directing. Melalui lembaga dakwah yang dibentuk oleh pesantren, hal ini sesuai dengan amanah UU No18/2019 pada pasal 39 Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.
2. Namun perlu adanya perbaikan yaitu pada perencanaan matang terkait semua program yang akan dilaksankan, persiapan SDM, penyusunan anggaran yang jelas, target capaian yang akan dituju, serta sistem pelaporan kegiatan yang baik.
3. Proses dakwah yang dijalankan pesantren sudah mendapatkan dukungan dan respon yang baik dari para umat/masyarakat, lembaga-lembaga keislaman, lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, seperti pemerintah kota Tangerang Selatan, Kementerian Agama pusat maupun Kementerian Agama Tangerang Selatan. Hal ini sejalan dengan amanah UU No.18/2019 pasal 42 "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
4. Khusus pada dukungan pendanaan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah, Kemenag pusat maupun Kemenag Tangerang Selatan masih sangat kecil jika dibandingkan kebutuhan

yang diperlukan, serta perlu lebih aktif untuk terjun langsung ke pesantren-pesantren terkait penyuluhan program dakwah pesantren yang dijalankan.

Adapun Saran yang dapat diberikan kepada pesantren Darus-Sunnah dalam menjalankan fungsi dakwah pesantren anatara lain:

1. Dalam perencanaan, perlu adanya perbaikan yaitu pada perencanaan matang terkait semua program yang akan dilaksankan, persiapan SDM, penyusunan anggaran yang jelas, target capaian yang akan dituju, serta sistem pelaporan kegiatan yang baik,
2. Mencari peluang jaringan-jaringan baru di selain wilayah yang sudah sering di datangi.
3. Sebagai bahan evaluasi program-program pada lembaga dakwah yang sudah dijalankan, keseluruhan dokumen-dokumen dan file-file yang terkait dapat diarsipkan secara keseluruhan agar memudahkan kinerja divisi lembaga dakwah baik yang sedang berjalan maupun untuk selanjutnya.
4. Khusus kepada Kementerian agama, perlu adanya informasi dan komunikasi yang lebih aktif terkait dukungan dakwah pesantren. Selain itu perlu adanya penambahan dukungan pendanaan khusus pada program dakwah yang dijalankan pondok pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Indra Muchlis. *Administrasi Organisasi dan Manajemen – Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika (2013)

Ahmad, Fahd. "Mengenal Ciri Khas Pesantren Muhammadiyah." suaramuslim.net, 2019. https://suaramuslim.net/mengenal-ciri-khas-pesantren-muhammadiyah/.

Akib, Haedar. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.

Alqan, Laodza Aisara. "Biksah: Warisan Dakwah Kedamaian KH. Ali Mustafa Yaqub Di Indonesia Timur." Bincangsyariah.com, 2023.

Anis Fatihatul Madaniah & Hudedi,*"Manajemen Proses Administrasi Dalam Dakwah"*. -Jurnal Relinesia (ISSN: 2961-7693 (2023, 2 (1)

Arikunto, Suharsimi. *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ayuningtias, Indriana, . Syahril, and Moh. Faisol. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle." *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 2, no. 1 (2021)

BPK, JDIH. "Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren." JDIH BPK, 2019. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019.

Darus-Sunnah, Pesantren. "MENJADI LEMBAGA YANG UNGGULDALAM PENGADERAN ULAMA." Pesantren Darus-Sunnah, 2022. https://darussunnah.sch.id/madrasah-darus-sunnah/.

Ditpdpontren.kemenag. "Data Pesantren." EMIS PD-PONTREN,2023.

https://ditpdpontren.kemenag.go.id/.

Hamriani, - "Organisasi Dalam Manajemen Dakwah", - Jurnal Dakwah Tablig (Vol. 14, No. 2, Desember 2013 : 239 – 249)(Hamriani H M 2013)

Ilham, Moh, and Novie Andriani Zakariya. "Analisis Kebijakan Kementerian Agama RI Terkait Impelementasi Program Kewirausahaan Di Pesantren Indonesia." *Idarotuna* 4, no. 1 (2022)

*Jamal Mustofa, Marwan Salahuddin, "*Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang Pesantren". IJOIS, Vol.1, No.01, (2020), pp.1-17

Mohammad Arif. "IMPLEMENTASI DAKWAH RASULULLAH DALAM ERA MILENIUM." *Jurnal Asketik* 4, no. 1 (2020): 110.

M. Ghozali, "*Strategi Pondok Pesantren dalam Pengembangan Dakwah"*. – Jurnal Anida (Vol.17 No.1 2017. 37-55) (Gozali, Amin, and Herman 2017)

Muhammad Makinuddin. "Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019): 239–56.

Mujahidin, Irfan. "PERAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAKWAH." *SYIAR Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 31–44.

Muttaqin, Ahmad Ihwanul. *STRATEGI ADAPTIF PONDOK PESANTREN DALAM MEMBANGUN LEARNING ORGANIZATION*. *UIN KHAS JEMBER*, 2022.

Royani, Ahmad. "Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Arus Perubahan." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 2018.

Sawir, Mohammad. et al. *ILMU ADMINISTRASI DI SEGALA BIDANG*, 2020.

Sondang P. Siagian. "Kerangka Dasar Ilmu Administrasi Administrasi," 285. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Syahbuddin. "Peran Pesantren Dalam Kaderisasi Dakwah." *Al-Qolam "Jurnal Dakwah & Pemberdayaan Masyarakat"* 5, no. 2 (2021)

Tobroni, and Eka Firmansyah. "Tipologi Manajemen Tradisional Dan Modern." *Research and Development Journal Of Education* 8, no. 1 (2022)

Zakki, Mohammad. "Pesantren Pespektif Historis : Memahami Ragam a Historical Perspective of Boarding Schools : Understanding the Variety of Typologies and Developments in Indonesia," no. c (2023).